Opini

**Tentang Sebuah Tanya**

(Sebuah Catatan atas Situasi Problematis di Flotim)

Entahkah sebuah tanya mesti dijawab? Tapi tanya selalu menghantar orang pada titik start, titik refleski atas realitas hidup. Bagi yang pernah bertanya, ia sedang dalam sebuah perjalanan. Yang tidak pernah dan enggan bertanya, ia sedang memutuskan jalan, yang untuknya, ia, dan bahkan yang lain mau berjalan. Tanya tidak hanya sekedar membangun sebuah kuriositas, rasa atau kerinduan untuk mengetahui. Ia juga adalah hasrat untuk membongkar sebuah “rahasia” kehidupan. Karena itu fobia tanya adalah kelesuhan orang yang sedang hidup; kalau tidak mau dibilang sudah mati ketika masih hidup. Sebuah tanya… hanya karena untuk sebuah hidup.

Flores Timur adalah salah satu kabupaten di NTT yang masih menyisahkan sekian banyak situasi problematis, yang mengundang banyak orang untuk tiada henti-hentinya melontarkan pertanyaan. Dua dari sekian problem yang sempat menghiasi halaman koran *Flores Pos* dan *Pos Kupang* beberapa waktu lalu adalah tertundanya penyelesaian kasus kematian Yohakim Gresituli Atamaran, yang ditemukan tewas di ruas jalan negara Maumere- Larantuka (di Blou dekat Lewolaga, kurang-lebih 38 km arah barat dari kota Larantuka) pada tanggal 31 Juli 2007 dan penutupan depot pertamina Larantuka serta kedisharmonisan hubungan Bupati Simon Hayon dan wakilnya Yosni Herin.

Sejumlah pertanyaan untuk kasus pertama, kematian Yohakim Gresituli Atamaran, antara lain; “Mengapa kasus ini belum diselesaikan? Pertanyaan ini melahirkan rentetan pertanyaan lain: Apakah benar terjadi kecelakaan murni? Seandainya bukan kecelakaan murni, apa modus operandi tindakan kriminal ini? Kasus kematian ini pernah diumumkan oleh kepolisian Kecamatan Titehena – Kabupaten Flotim sebagai kecelakaan murni, beberapa hari setelah peristiwa naas ini. Namun delapan bulan kemudian, atas tindakan pro-aktif keluarga untuk mengumpulkan bukti, mencari informasi dan keterangan, serta dugaan bahwa kematian Yohakim Gresituli Atamaran adalah akibat penganiyaan, serta atas bantun Polda NTT, maka pada tanggal 17 April 2008 kasus ini diproses lagi di kepolisian Flotim. Bertepatan dengan itu aparat kepolisian Flotim menjemput paksa empat orang di Desa Lewoingu yang diduga bertanggungjawab atas kematian Yohakim Gresituli Atamaran. Setelah kurang lebih empat bulan ditahan di Polres Flotim, tanggal 16 Agustus 2008 keempat tahanan itu dikeluarkan. Adapaun informasi yang beredar atas alasan keluarnya keempat tahanan ini sangat bervariasi. Di satu pihak alasan dikeluarkannya tahanan ini karena batas waktu penahanan di Polres Flotim sudah berakhir dan pihak kejaksaan, aparat kepolisian diminta untuk melengkapi Berkas Acara Peyelidikan (BAP) guna proses penyidikan selanjutnya di pengadilan. Status keempat tersangka itu lalu berubah menjadi tahanan kota dengan ketentuan wajib lapor dua kali dalam seminggu. Di pihak lain beredarnya informasi bahwa keempat tahanan itu dibebaskan karena tidak ditemukan alasan dan bukti kuat keterlibatannya. Mereka bebas murni demi hukum. Persoalannya sejauhmana kebenaran perkembangan kasus ini dan sejauh mana kebenaran isu yang beredar? Kalau tahanan itu dibebaskan lantaran tidak ditemukannya bukti keterlibatan mereka, apakah itu hak kepolisian Flotim untuk mengumumkannya? Ataukah pengunguman itu merupakan hak pihak pengadilan setelah melewati proses penyidikan perkara? Kalau toh tahanan itu dikeluarkan dari tahanan Polres Flotim, karena berakhirnya masa penahanan di Polres guna penyidikan, dan pihak kejaksaan meminta aparat kepolisian untuk melengkapi BAP, maka pertanyaan lain, apakah tugas polisi untuk melengkapi keterangan pada perkas penyidikan kasus ini, ataukah pihak keluarga korban? Pertanyaan ini sungguh penting karena sejak kasus ini mencuat, justru keluarga korbanlah yang paling pro-aktif untuk mengumpulkan keterangan seputar tragedi ini dan bukan pihak kepolisian di Flotim.

Kalau soal ini diperdalam dengan membuat pertanyaan lain lagi seperti mengapa situasi konflik ini memecahkan dua kelompok (blok) dalam masyarakat di kampung kecil desa Lewoingu, maka kita bisa menemukan keterhubungan antara kasus kematian Yohakim Gresituli Atamaran dengan tatanan pemerintahan di desa Lewoingu sampai pelantikan kades periode 2008 – 2011. Mengapa demikian? Fakta menunjukkan bahwa proses pemilihan kades sampai pelantikan menyisahkan ketidakpuasan beberapa warga. Ada upaya protes selama hari-hari menjelang pelantikan kades terpilih. Yang menjadi substansi persoalan bukanlah salah atau benarnya kelompok pemrotes itu mengajukan protesnya bahkan hingga di DPRD Flotim. Tapi mengapa pemerintahan Kecamatan Titehena dan Kabupaten Flotim melalui Asisten yang pernah memfasilitasi konflik ini toh tidak berhasil? Belakangan ditemukan indikasi bahwa konflik yang meluas di tengah masyarakat Lewoingu cukup kompleks; ia tidak hanya bertautan dengan kematian Yohakim Gresituli Atamaran, tetapi ada juga nuansa politis dan essensi dari sebuah lembaga fungsonaris adat di kampung. Hal ini terbukti bahwa sejak pelantikan Kades oleh Bupati Flotim Simon Hayon hingga dibukanya lagi penyidikan kasus kematian Yohakim, masih menyisahkan problem di kampung ini.

Pelbagai pertanyaan seperti: mengapa kasus ini belum diselesaikan secara tuntas? Benarkah bukti kurang valid? Mungkinkah kinerja aparat kepolisian yang kurang becus? Atau adakah kemungkinan penyuapan dan penyogokan antara kelompok-kelompok tertentu? Kalau nanti dibuktikan sebagai satu tindakan kriminal, apa modus operandinya? Pelbagai pertanyaan ini bisa saja dialamatkan kepada masyarakat Flotim umumnya, dan kinerja kepololisian dan kejaksaan di Flotim, dan pada akhirnya Pemda Flotim. Mengapa? Rentetan pertanyaan ini memperlihatkan bahwa kasus ini bukan lagi persoalan antar masyarakat di desa Lewoingu tapi persoalan bagi semua orang di Flotim yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta penegakan kebenaran dan keadilan yang kian surut. Ia juga satu pertanyaan untuk pemerintahan Flotim (bupati dan wakil), yang diwarnai oleh kurang sedapnya keharmonisan hubungan mereka.

Untuk kasus kedua, ditutupnya depot portamina Larantuka. Kenaikan BBM masih menyisahkan keluhan dipelbagai lapisan masyarakat. Tidak saja persoalan kelangkaan BBM tetapi juga mahalnya harga BBM karena kesulitan untuk mendapat pasokan BBM di Larantuka. Belum lagi pengisihan di SPBU mengutamakan yang membawa jerigen (*Curhat, Pos Kupang*, 6 September 2008). Kenyataan in semakin diperparah ketika Pemda Flotim gagal untuk mempertahankan tetap eksisnya depot pertamina di Heras – Larantuka, kendati sudah diberi kesempatan ulang setahun untuk me-*manage*-nya. Kesulitan toh tidak hanya masyarakat Flotim yang meliputi kepaulauan Solor dan Adonara, tetapi juga Kabupaten Lembata yang selama ini dilayani dari depot Pertamina Larantuka. Situasi sulit ini tetap bertahan selama premium disuplay dari Maumere, karena kemungkinan untuk menaikan harga BBM secara sepihak di Flotim bisa cenderung tinggi. Litani pertanyaan kepada Pemda Flotim mesti diperpanjang,”Mengapa keberadaan depot Pertamina ditutup? Mungkinkah karena rugi? Tapi mengapa sampai rugi? Mengapa kemurahan yang masih diberikan kepada Pemda untuk me-*manage* depot Pertamina masih gagal juga? Mungkin pertanyaan ini juga bisa dialamatkan kepada bupati dan wakilnya yang masih *merajo* dan tidak mau *baku bae*. Kalau *dorang* (Bupati dan wakilnya) terus *merajo*, pertanyaan baru tetap akan lahir.

Melontarkan sekian pertanyaan untuk sebuah kasus mesti dilihat sebagai satu kebajikan yang membantu kita untuk mengungkapkan akar persoalan tertentu. Keenganan untuk melontarkan pertanyaan atas setiap kasus bisa menjadi satu titik star untuk mengungkapkan ‘rahasia’ dibalik semua permasalahan yang tidak pernah diselesaikan. Ia adalah kebajikan untuk mencermati permasalahan yang ada. Kebajikan tidak hanya mencari pemecahan dengan menempatkan rekonsiliasi atau damai tanpa menemukan akar dari tiap persoalan. Kesukaan melahirkan pertanyaan sudah merupakan sebagian dari jawaban terhadap setiap soal yang diajukan.